

Tagar sebagai Praktik Perlawanan Digital Warga: Strategi Diskursif dalam #TolakRUUTNI di Media Sosial

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2025, Vol. 15, No. 1: 31-56
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2025

Rheza Eka Athallah*

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Asri Khairunnisa

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Dini Safitri

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menuai penolakan karena dianggap akan membuka jalan bagi kembalinya militer di ruang sipil dan minimnya partisipasi publik, sehingga memicu gelombang protes di media sosial dengan tagar #TolakRUUTNI sebagai simbol resistensi kolektif yang viral pasca aksi Koalisi Masyarakat Sipil di Hotel Fairmont pada 15 Maret 2025. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan tagar #TolakRUUTNI sebagai bentuk perlawanan digital terhadap RUU TNI dengan fokus pada akun @barengwarga di platform X. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough, artikel ini mengkaji gaya bahasa, strategi diskursif, dan makna sosial yang lebih luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tagar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat berbagi informasi, tetapi juga sebagai simbol perlawanan sipil yang terorganisir terhadap militerisasi sipil dan kemunduran representasi demokratis. Melalui penggunaan bahasa yang informal, satiris, dan sarat muatan politik, akun @barengwarga membangun identitas kewargaan kolektif dan narasi tandingan yang menantang wacana negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital, tempat masyarakat sipil dapat menegaskan agensinya secara politik dalam cara yang partisipatif, terhubung, dan dialogis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian yang berkembang tentang aktivisme digital, perlawanan sipil, dan analisis

* Corresponding author:

Rheza Eka Athallah

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: rheza.eka.athallah@mhs.unj.ac.id

wacana kritis, dengan menunjukkan bagaimana suara-suara yang terpinggirkan memobilisasi strategi simbolik dan diskursif untuk melawan kekuasaan negara melalui platform jaringan dalam konteks Indonesia.

Kata-kata Kunci

Aktivisme digital, Analisis Wacana Kritis, gerakan tagar, media sosial, militerisasi, perlawanan sipil

Abstract

The Draft Law on the Indonesian National Armed Forces (RUU TNI), criticized for enabling military involvement in civilian affairs and lacking public participation, has sparked widespread protests on social media, with the hashtag #TolakRUUTNI becoming a symbol of collective resistance—especially after the Civil Society Coalition disrupted a closed meeting at the Fairmont Hotel on March 15, 2025. This article analyzes the use of the #TolakRUUTNI hashtag as a form of digital resistance, focusing on the @barengwarga account on platform X. Employing a qualitative descriptive method and Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA), the study explores linguistic styles, discursive strategies, and their broader social implications. The findings show that the hashtag serves not only to disseminate information but also to construct a symbolic space for organized civil resistance against creeping militarization and democratic backsliding. Through informal, satirical, and politically charged language, @barengwarga builds a collective civic identity and articulates counter-narratives that challenge state-led discourses. This research concludes that social media acts as a digital public sphere where citizens can express political agency in participatory and dialogic ways. The study contributes to scholarship on digital activism, civil resistance, and critical discourse by revealing how marginalized voices deploy symbolic and discursive strategies to resist state power in Indonesia's evolving digital landscape.

Keywords

Civil resistance, Critical Discourse Analysis, digital activism, hashtag movement, militarization, social media

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah secara fundamental cara individu berkomunikasi dan berpartisipasi dalam ruang publik. Beragam platform media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram kini menjadi ruang interaksi yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan gagasan, membangun opini, dan mengorganisasi aksi kolektif secara luas dan cepat (Angga, Poa, and Rikardus 2023). Ruang digital pun telah berkembang menjadi medan baru bagi praktik demokrasi, khususnya dalam hal partisipasi warga dalam isu-isu sosial dan politik.

Sebagai negara demokratis, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak dasar warga negara. Dalam konteks demokrasi digital, kebebasan ini semakin diperkuat dengan hadirnya media sosial sebagai kanal penting untuk menyuarakan aspirasi, mengkritisi kebijakan, serta mendorong akuntabilitas pemerintah. Namun, ketika kebijakan publik dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat atau mengabaikan transparansi, respons penolakan pun menguat di ruang digital. Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) merupakan salah satu contohnya.

RUU TNI dianggap bermasalah karena dinilai membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil, disusun dan dirancang tanpa partisipasi publik yang memadai. Hal ini memicu gelombang penolakan dari masyarakat sipil, terutama melalui media sosial. Tagar #TolakRUUTNI menjadi simbol resistensi kolektif yang muncul setelah aksi Koalisi Masyarakat Sipil menerobos ruang rapat di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 15 Maret 2025. Sejak saat itu, tagar ini menyebar masif di platform X (sebelumnya Twitter), menjadi *trending topic*, dan digunakan oleh berbagai akun aktivis dan warga, termasuk akun @barengwarga.

Akun @barengwarga menjadi salah satu aktor digital yang aktif dalam menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI. Melalui unggahan, kutipan, dan ajakan, akun ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk narasi dan memobilisasi opini publik. Peran akun ini penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk membangun wacana politik dan mengartikulasikan perlawanan terhadap kebijakan negara.

Fenomena penggunaan tagar #TolakRUUTNI oleh @barengwarga merefleksikan dinamika komunikasi politik digital di Indonesia. Tagar ini berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap militerisasi dan pembatasan ruang sipil. Melalui penggunaan bahasa, simbol, dan ajakan aksi, akun ini berkontribusi pada pembentukan ruang publik digital yang kritis dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji penggunaan tagar untuk perlawanan sipil dengan panduan pertanyaan berikut: Bagaimana praktik penggunaan tagar #TolakRUUTNI oleh akun @barengwarga membentuk wacana penolakan terhadap RUU TNI di media sosial? Bagaimana tagar #TolakRUUTNI digunakan sebagai bentuk perlawanan digital dalam ruang politik media sosial? dan apa dampak penggunaan tagar #TolakRUUTNI terhadap praktik demokrasi digital dan konstruksi ruang publik sipil di Indonesia?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akun @barengwarga menggunakan tagar #TolakRUUTNI dalam membentuk wacana penolakan terhadap RUU TNI; menjelaskan bagaimana tagar tersebut menjadi bagian dari strategi perlawanan digital di ruang media sosial; dan mengkaji dampaknya terhadap praktik demokrasi digital dan pembentukan ruang publik sipil di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian komunikasi politik digital, serta menjadi rujukan dalam memahami praktik resistensi warga dalam era demokrasi digital.

Penelitian tentang aktivisme tagar (*hashtag activism*) atau aktivisme berbasis digital kini menjadi semakin menonjol dalam kajian komunikasi dan studi media seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga menjadi arena politik yang mempertemukan wacana, resistensi, dan solidaritas lintas batas.

Penelitian oleh Inobemhe and Santas (2022) mengenai #EndSARS di Nigeria menunjukkan bagaimana media sosial berperan krusial dalam mengorganisir dan memobilisasi protes terhadap kekerasan polisi. Di tengah kegagalan media arus utama, digital media memungkinkan solidaritas transnasional dan memperkuat narasi perlawanan.

Sementara itu, studi oleh Ahaotu and Oshamo (2023) terkait #BlackLivesMatter mengadopsi pendekatan multimodal discourse

analysis untuk mengungkap bagaimana unsur verbal dan visual seperti teks, warna, dan gambar membentuk makna ideologis dan emosional. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivisme digital mengandalkan kekuatan visual untuk memperkuat isu rasial, keadilan sosial, dan identitas kolektif.

Dalam konteks Timur Tengah, riset mengenai #GreatMarchOfReturn oleh Majeed & Abushbak (2024) menyoroti politik “phygital protest”, yaitu integrasi antara protes fisik dan digital. Twitter menjadi ruang diskursif yang penting dalam membangun narasi nasionalisme dan menentang dominasi Israel melalui konten digital yang bersifat emosional dan politis.

Lebih lanjut, Sebring (2019) membahas fenomena hashtag feminisme, seperti #MeToo, sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan sistemik dalam masyarakat Barat. Ia menekankan potensi sekaligus keterbatasan media sosial dalam mencapai tujuan politik jangka panjang.

Di Indonesia, studi oleh Zuraida (2023) yang membandingkan #PercumaLaporPolisi dan #PolriSesuaiProsedur menunjukkan pentingnya framing dan network analysis dalam efektivitas gerakan digital. Penelitian ini menekankan bahwa struktur jaringan dan kejelasan pesan sangat memengaruhi daya jangkauan dan partisipasi publik dalam aktivisme digital.

Dalam konteks ini, penelitian tentang tagar #TolakRUUTNI oleh akun @barengwarga akan memperluas literatur yang ada dengan mengintegrasikan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough dalam konteks digital aktivisme di Indonesia. Berbeda dengan studi sebelumnya yang banyak fokus pada aspek jaringan (*network analysis*) atau semiotik visual semata, penelitian ini secara eksplisit menyoroti relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi dalam teks digital—misalnya dalam narasi “mereka bukan wakil rakyat kita”—sebagai bentuk delegitimasi terhadap institusi legislative; mengungkap praktik diskursif perlawanan sipil, di mana media sosial digunakan sebagai ruang publik digital untuk mengartikulasikan ideologi resistensi dan memperkuat identitas kolektif; menambahkan dimensi praksis sosial, yaitu keterhubungan antara produksi wacana digital dengan situasi politik aktual, seperti kontroversi RUU TNI yang memunculkan ketegangan sipil-militer dalam ranah public; dan mengisi celah dalam studi aktivisme digital di Indonesia yang sebelumnya lebih berfokus pada respons terhadap institusi kepolisian (#PercumaLaporPolisi), dengan membawa isu legislasi militer ke dalam wacana publik digital. Dengan demikian, penelitian ini

memberikan kontribusi konseptual dan kontekstual dalam kajian aktivisme digital di era pasca-reformasi Indonesia, khususnya dengan menekankan pentingnya kritik ideologis melalui teks digital dalam membangun resistensi sipil berbasis media sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh. Fokus dari pendekatan ini adalah menyajikan uraian naratif terhadap gejala-gejala sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat (Samsuri, Mulawarman, and Hudiyo 2022).

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari tiga unggahan akun X (Twitter) @barengwarga yang menggunakan tagar #TolakRUUTNI. Pemilihan data dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria kuantitatif minimum, yakni 10.000 suka (*likes*), 5.000 unggahan ulang (*retweets*), dan 150 komentar. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur akademik relevan sebagai data pendukung.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui tahap reduksi, yaitu proses penyaringan untuk menyeleksi elemen-elemen kunci yang paling relevan dengan tujuan analisis. Reduksi ini bertujuan menyederhanakan kompleksitas data tanpa menghilangkan makna pentingnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK; *Critical Discourse Analysis*) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough sebagai kerangka analitis utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap keterkaitan antara teks, praktik diskursif, dan struktur sosial dalam konteks produksi dan sirkulasi wacana digital.

Dalam kerangka AWK model Fairclough, proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan:

Deskripsi (analisis teks): mengkaji struktur linguistik teks, termasuk pilihan diksi, gramatika, metafora, dan gaya Bahasa; Interpretasi (analisis praktik diskursif): menelusuri bagaimana teks diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi oleh aktor atau kelompok tertentu dalam konteks sosial tertentu; dan Eksplanasi (analisis praktik sosial): menghubungkan wacana dengan struktur sosial yang lebih luas, seperti ideologi, kekuasaan, dan konflik sosial yang direpresentasikan atau dipertaruhkan dalam wacana tersebut (Kabanga, Tabuni, and Kalangi 2023). Melalui pendekatan ini,

penelitian diharapkan dapat mengungkap tidak hanya makna tekstual, tetapi juga dimensi ideologis dan politis dari wacana digital yang beredar dalam konteks penolakan terhadap RUU TNI.

#TolakRUUTNI pada @barengwarga: Perspektif Analisis Wacana Kritis

Dalam kajian linguistik dan komunikasi kontemporer, Analisis Wacana Kritis merupakan salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk memahami hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam praktik sosial. Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan pendekatan ini adalah Norman Fairclough, yang merumuskan model tiga dimensi dalam AWK, yaitu (1) deskripsi teks, (2) interpretasi hubungan tekstual dengan praktik wacana, dan (3) penjelasan keterkaitan antara wacana dan praktik sosial. Dalam lima tahun terakhir, model ini terus digunakan secara luas untuk menganalisis berbagai fenomena seperti narasi politik, media sosial, pendidikan, hingga diskursus keagamaan, dengan penyesuaian terhadap konteks digital dan global kontemporer (Ali et al. 2025).

Fairclough memandang wacana tidak sekadar sebagai bentuk representasi linguistik, tetapi sebagai praktik sosial yang memiliki potensi untuk mereproduksi maupun menantang struktur kekuasaan yang ada. Sejumlah studi terkini menunjukkan relevansi pendekatan ini dalam menganalisis berbagai bentuk wacana digital, mulai dari komentar di YouTube (Ali et al. 2025), kampanye politik (Latiko and Idris 2024), hingga narasi ideologis dalam karya sastra dan teks keagamaan (Mahdavi, Najafi, and Naqizadeh 2025).

Lebih lanjut, Fairclough menekankan bahwa bahasa tidak pernah bersifat netral. Pemilihan diksi, struktur kalimat, serta penggunaan metafora mencerminkan posisi ideologis tertentu dan turut berperan dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, AWK menurut Fairclough bersifat tidak hanya deskriptif, melainkan juga kritis, dengan tujuan utama mengungkap dan mengkritisi relasi kuasa yang tersembunyi dalam teks maupun dalam praktik interaksi sosial (Panahi and Vaezzadeh 2024).

Tagar #TolakRUUTNI mulai muncul setelah aksi Koalisi Masyarakat Sipil yang membobol ruang rapat di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 15 Maret 2025. Sejak kejadian tersebut, tagar ini menyebar luas di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), menjadi topik yang sedang tren,

dan digunakan secara luas oleh berbagai akun aktivis serta masyarakat, termasuk akun @barengwarga (lihat Gambar 1). Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada tiga unggahan dari akun X @barengwarga yang menyertakan tagar #TolakRUUTNI sebagai sumber data utama (lihat Tabel 1).



Gambar 1. Akun X @barengwarga
Sumber: X.com/barengwarga

Tabel 1. Unggahan Akun @barengwarga dengan #TolakRUUTNI

No.	Tanggal & Waktu Unggahan	Isi Pokok Unggahan	Alasan Pemilihan Unggahan	Kategori Analisis
1	15 Maret 2025, 21:47 WIB	Kritik terhadap DPR RI, kutipan dari @NarasiNewsroom, simbol visual, tagar #TolakRUUTNI.	548K tayangan, 17K suka, 9.1K retweet. Kaya simbol visual dan diksi konfrontatif.	Bahasa populis; Konflik sipil-negara
2	16 Maret 2025, 16:37 WIB	Satire ‘stafsus squidward’, tuduhan kampanye disinformasi, sarkasme politis.	11.3M tayangan, 23.6K suka, 15.5K retweet. Contoh humor politik & resistensi simbolik.	Sarkasme; Diskursus tandingan
3	20 Maret 2025, 00:21 WIB	Ajakan blokir gedung DPR, seruan kolektif, narasi ‘supremasi sipil adalah amanat reformasi’.	4.2M tayangan, 40.3K suka, 18.3K retweet. Paling operatif, ajakan aksi nyata.	Mobilisasi kolektif; Ideologi reformasi

Unggahan Pertama

Pada 15 Maret 2025, akun X @barengwarga membagikan sebuah unggahan yang berbunyi: “Apa respons mereka? Diam dan nyuruh keamanan buat ngeluarin. Udah sadar belum? Mereka nggak peduli, mereka bukan wakil rakyat kita!” (Gambar 2). Hingga pukul 21.47 WIB pada hari yang sama, unggahan tersebut telah memperoleh 548 ribu tayangan, 17 ribu tanda suka, 9.100 kali dibagikan ulang, dan 190 komentar (diakses pada 13 Mei 2025 pukul 19.32 WIB).



Gambar 2. Unggahan Pertama akun @barengwarga

Sumber: x.com/barengwarga/status/1900921721856967013?t=

Analisis Teks (Deskripsi)

Unggahan tersebut terdiri atas dua bagian utama: (1) pernyataan langsung dari akun @barengwarga, dan (2) kutipan dari media @NarasiNewsroom. Teks ini menampilkan sejumlah ciri linguistik khas, terutama dalam gaya bahasa dan pilihan diksi yang digunakan.

Gaya bahasa yang digunakan oleh akun @barengwarga bersifat informal, lugas, dan menyerupai bahasa lisan khas masyarakat urban digital. Hal ini tampak dari penggunaan kata-kata seperti “ngeluarin”,

“nggak peduli”, dan “udah sadar belum?”, yang bertujuan membangun kedekatan dengan khalayak serta mengekspresikan emosi secara langsung. Struktur kalimat retorik dan provokatif—seperti pertanyaan “Apa response mereka?” dan “Udah sadar belum?”—digunakan untuk menantang pembaca serta memicu keterlibatan emosional.

Teks juga memperlihatkan adanya dikotomi identitas melalui penggunaan pronomina “mereka” dan “kita”. Kontras ini secara implisit membentuk jarak antara warga negara (sebagai “kita”) dan para wakil rakyat (sebagai “mereka”), yang menggambarkan ketegangan dan kritik terhadap representasi politik. Simbol visual seperti emoji jari tengah turut memperkuat pesan perlawanan terhadap otoritas, serta menjadi ekspresi visual dari ketidakpuasan publik.

Selain itu, penggunaan tagar #TolakRUUTNI berfungsi tidak hanya sebagai alat klasifikasi konten, tetapi juga sebagai simbol partisipasi dalam gerakan kolektif yang lebih luas. Secara keseluruhan, struktur dan gaya teks ini dirancang untuk menyampaikan ketidakpuasan yang kuat serta memperkuat solidaritas di antara komunitas digital yang bersikap kritis dan resistif terhadap otoritas negara.

Praktik Diskursif (Interpretasi)

Unggahan ini muncul sebagai respons kritis terhadap peristiwa dikeluarkannya tiga aktivis masyarakat sipil dari ruang rapat DPR RI. Dalam kerangka analisis praktik wacana, unggahan ini dapat dipahami sebagai bentuk produksi makna yang melibatkan proses intertekstualitas dan rekontekstualisasi.

Intertekstualitas tercermin melalui kutipan dari akun @NarasiNewsroom, sebuah media digital yang tengah berkembang dan memperoleh perhatian luas, khususnya di kalangan pengguna media sosial. Kutipan tersebut digunakan sebagai landasan legitimasi untuk memperkuat narasi kritis yang dibangun oleh akun @barengwarga. Melalui proses rekontekstualisasi, informasi jurnalistik yang semula bersifat netral atau informatif diolah kembali menjadi wacana yang emosional, populistis, dan resistensial.

Sasaran utama dari praktik wacana ini tampaknya adalah masyarakat digital yang progresif, para aktivis sipil, dan pengguna media sosial yang memiliki kecenderungan kritis terhadap institusi negara, khususnya

lembaga legislatif. Dalam konteks ini, unggahan tersebut berfungsi sebagai bentuk wacana tandingan (*counter-discourse*) yang secara aktif menantang dominasi narasi resmi yang dikeluarkan oleh institusi formal.

Dengan gaya penyampaian yang sarat muatan emosional dan ideologis, unggahan ini menunjukkan bahwa praktik wacana di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai arena perjuangan simbolik. Melalui bahasa dan representasi, wacana tersebut menjadi alat untuk merebut makna dan memengaruhi opini publik dalam ranah digital.

Praktik Sosial (Eksplanasi)

Dari perspektif sosial-politik, unggahan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas, yakni kontroversi terkait Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). RUU tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai potensi dominasi militer dalam ranah sipil serta kemungkinan tergerusnya prinsip-prinsip demokrasi sipil.

Unggahan ini juga merefleksikan ketegangan yang semakin nyata antara masyarakat sipil dan lembaga legislatif, khususnya dalam hal persepsi mengenai eksklusivitas dan tertutupnya proses legislasi. Narasi seperti “mereka bukan wakil rakyat kita” menegaskan adanya krisis representasi, di mana DPR RI dianggap tidak lagi mewakili aspirasi publik.

Melalui praktik diskursif yang dibangun, unggahan ini secara simbolik mendekonstruksi otoritas lembaga legislatif sebagai institusi representatif. Identitas kolektif “kita” (rakyat) dikonstruksikan sebagai pihak yang terpinggirkan dan tidak didengarkan oleh negara. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan artikulasi ideologi resistensi sipil sekaligus sebagai saluran untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan politik secara lebih terbuka.

Dengan memanfaatkan strategi bahasa yang ekspresif, simbol-simbol visual yang kuat, serta narasi yang bersifat provokatif, unggahan ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi simbolik perlawanan, tetapi juga sebagai instrumen operatif dalam membentuk opini publik dan membangun solidaritas kolektif di ruang digital.

Unggahan Kedua

Pada 16 Maret 2025, akun X @barengwarga membagikan unggahan kedua yang masih berkaitan dengan tema penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Unggahan tersebut berbunyi: “Campaign disinformation udah dimulai sama stafsus squidward ini yang sepertinya dimajuin buat ngedegradasi perjuangan sipil, kita harus lebih bersiap” (Gambar 3). Pada pukul 16.37 WIB di hari yang sama, unggahan ini telah memperoleh 11,3 juta tayangan, 23,6 ribu tanda suka, 15,5 ribu unggahan ulang (repost), dan 5,2 ribu komentar (diakses pada 18 Mei 2025 pukul 21.03 WIB).



Gambar 3. Unggahan Kedua Akun @barengwarga

Sumber: x.com/barengwarga/status/1901206104186491346?t=

Analisis Teks (Deskripsi)

Teks unggahan ini memperlihatkan ciri linguistik yang khas dan strategis, terutama dalam penggunaan gaya bahasa informal dan kolokial. Hal ini tampak dari pemakaian kosakata seperti “udah,” “dimajuin,” dan “ngedegradasi” yang mencerminkan kedekatan dengan gaya tutur lisan

masyarakat urban digital, terutama generasi muda. Pemilihan diksi tersebut memperkuat komunikasi horizontal antaranggota komunitas digital dan mendorong rasa keterlibatan yang lebih kuat.

Salah satu elemen yang mencolok adalah penggunaan istilah sarkastik “stafsus squidward” untuk menyebut pejabat negara. Referensi ini menyamakan tokoh publik dengan karakter fiksi bernuansa sinis dan pasif, yang berfungsi sebagai alat delegitimasi simbolik. Penggunaan humor satir seperti ini menciptakan ikon kultural yang mudah dikenali, dibagikan, dan dimobilisasi sebagai bentuk kritik sosial.

Struktur naratif dalam teks ini bersifat langsung dan penuh tudingan, sebagaimana tampak dalam frasa “dimajuin buat ngedegradasi perjuangan sipil.” Meskipun tidak menyertakan bukti konkret, pernyataan tersebut sangat tegas secara politis dan retorik. Ungkapan semacam ini umum ditemukan dalam diskursus perlawanan digital, yang cenderung menolak kerangka objektivitas dominan untuk menyampaikan posisi ideologis dengan lebih terbuka.

Tagar #TolakRUUTNI kembali digunakan secara konsisten dan strategis sebagai alat pengikat antara konten individu dan jaringan gerakan digital yang lebih luas. Dengan demikian, teks ini berfungsi sebagai ajakan kolektif untuk mewaspadai apa yang dipersepsikan sebagai kampanye disinformasi yang melemahkan perjuangan sipil, sembari memperkuat narasi resistensi melalui bahasa, humor, dan ekspresi politik.

Praktik Diskursif (Interpretasi)

Unggahan ini dapat dipahami sebagai respons terhadap persepsi adanya kampanye disinformasi yang dilancarkan oleh negara melalui tokoh-tokoh publik pro-pemerintah. Dalam hal ini, akun @barengwarga tidak hanya mengkritik isi narasi resmi, tetapi juga menyoroti intensi dan strategi komunikasi negara yang dianggap manipulatif.

Dari sisi produksi wacana, unggahan ini berasal dari aktor yang diasosiasikan dengan gerakan sipil digital. Tujuannya adalah untuk menandingi narasi dominan yang diproduksi oleh institusi negara dengan menghadirkan narasi alternatif yang membela perjuangan masyarakat sipil. Strategi ini merupakan bentuk upaya untuk merebut kembali otoritas naratif dan memperluas ruang diskusi publik yang lebih partisipatif dan kritis.

Dari sisi konsumsi, unggahan ini ditujukan kepada komunitas digital yang memiliki kesadaran politik tinggi, cenderung progresif, dan skeptis terhadap narasi institusional. Pesan utamanya adalah mengajak komunitas daring untuk tetap waspada terhadap disinformasi dan propaganda, serta membangun solidaritas kolektif dalam menghadapi narasi tandingan negara.

Penggunaan elemen semiotik—termasuk gaya bahasa emosional, sarkasme, humor, dan tagar—menciptakan daya resonansi yang kuat di kalangan pengikutnya. Sinergi antara aspek retorik dan visual dalam unggahan ini berfungsi sebagai alat mobilisasi resistensi di ruang digital.

Praktik Sosial (Eksplanasi)

Dalam konteks sosial-politik yang lebih luas, unggahan ini mencerminkan dinamika konflik antara masyarakat sipil dan negara, khususnya terkait proses legislasi RUU TNI. RUU ini dikritik karena dianggap berpotensi memperluas keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, yang dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap supremasi sipil.

Akun @barengwarga memosisikan dirinya sebagai bagian dari gerakan sipil yang merasa terpinggirkan oleh proses legislasi yang eksklusif dan minim partisipasi publik. Narasi yang dibangun menggambarkan negara tidak hanya abai terhadap aspirasi masyarakat, tetapi juga aktif menggunakan strategi komunikasi politik untuk mendeligitimasi kritik melalui disinformasi yang sistematis.

Unggahan ini memotret benturan ideologis antara dua kutub wacana: Narasi institusional, yang berusaha mengontrol opini publik melalui moderasi simbolik terhadap kritik, dan narasi sipil, yang mengedepankan pentingnya mempertahankan ruang kritik sebagai bagian dari proses demokratis.

Dalam konteks ini, penyebutan “stafsus” tidak sekadar menunjuk pada individu tertentu, tetapi merepresentasikan sistem kekuasaan yang memanfaatkan figur publik sebagai alat hegemonik. Pernyataan “kita harus lebih bersiap” merupakan seruan untuk membangun kekuatan simbolik dan ketahanan ideologis komunitas digital dalam menghadapi tekanan narasi dominan.

Media sosial, dalam hal ini, tampil sebagai arena utama dalam kontestasi wacana antara negara dan masyarakat sipil. Unggahan seperti ini memperlihatkan bagaimana ruang digital digunakan secara aktif untuk memobilisasi perlawanan, menyampaikan ekspresi politik, dan memperluas solidaritas antaranggota komunitas.

Unggahan Ketiga

Unggahan ketiga akun @barengwarga diunggah pada 20 Maret 2025 (Gambar 4). Pada pukul 00.21, unggahan ini telah memperoleh 4,2 juta tayangan, 40,3 ribu suka, 18,3 ribu unggahan ulang, dan 660 komentar (diakses pada 18 Mei 2025 pukul 21.30).



Gambar 4. Unggahan Ketiga akun @barengwarga

Sumber: x.com/barengwarga/status/1902410210205184124

Analisis Teks (Deskripsi)

Unggahan ini memuat pernyataan sebagai berikut:

Mulai malam ini kami memblokir akses masuk gedung DPR agar rapat paripurna RUU TNI nanti pagi tidak disahkan. Kami mengajak kalian semua warga sipil baik itu mahasiswa, buruh, pelajar, pekerja, supporter bergabung bersama kami menyegel gedung DPR agar dikembalikan kepada rakyat. Supremasi sipil adalah amanat reformasi.

Secara linguistik, teks ini menunjukkan sejumlah ciri khas yang signifikan. Pertama, penggunaan kalimat deklaratif dan ajakan kolektif mencerminkan gaya komunikasi yang bersifat asertif sekaligus partisipatoris. Pronomina seperti “kami” dan “kalian semua warga sipil” membentuk identitas kolektif yang solid, menggambarkan posisi warga sipil sebagai subjek politik yang aktif dan sadar.

Selanjutnya, teks ini dipenuhi oleh istilah-istilah politis yang memiliki muatan ideologis kuat, seperti “supremasi sipil”, “amanat reformasi”, dan “dikembalikan kepada rakyat”. Ungkapan-ungkapan ini tidak hanya menunjukkan afiliasi terhadap nilai-nilai demokrasi pasca-Orde Baru, tetapi juga menjadi penanda diskursif atas tuntutan agar negara tunduk pada kedaulatan sipil.

Dari segi struktur naratif, unggahan ini menekankan pentingnya aksi langsung. Pilihan kata kerja aktif seperti “memblokir”, “mengajak”, dan “menyegel” menegaskan keberanian, ketegasan, dan rasa urgensi dari pihak pengunggah. Hal ini memperkuat narasi bahwa tindakan tersebut merupakan ekspresi deliberatif dan bentuk tanggung jawab warga terhadap kondisi demokrasi yang dianggap terancam.

Secara visual, unggahan ini dilengkapi dengan gambar suasana malam di depan Gedung DPR, kehadiran tenda-tenda aksi, proyeksi layar kosong, serta massa yang berkumpul. Elemen-elemen visual tersebut memperkuat narasi resistensi yang damai namun tegas. Kehadiran tagar #TolakRUUTNI menjadi simpul diskursif yang menghubungkan unggahan ini dengan gerakan perlawanan digital yang lebih luas terhadap kebijakan negara.

Praktik Diskursif (Interpretasi)

Unggahan ini diproduksi dalam konteks meningkatnya ketegangan antara masyarakat sipil dan lembaga legislatif, terutama terkait rencana pengesahan RUU TNI. Akun @barengwarga, dalam hal ini, memosisikan dirinya sebagai media warga yang menawarkan narasi tandingan terhadap wacana resmi negara dan media arus utama.

Dari perspektif produksi wacana, konten ini merupakan hasil kerja entitas non-negara berbasis akar rumput dan termasuk dalam praktik digital activism. Media sosial dimanfaatkan sebagai medium distribusi yang bersifat cepat, luas, dan tidak hierarkis—menandai pergeseran dari model komunikasi politik vertikal ke model horizontal yang berbasis partisipasi warga.

Distribusi konten ini dilakukan melalui jejaring sosial yang terhubung secara organik, memanfaatkan algoritma dan partisipasi publik untuk memperluas jangkauan. Ajakan kolektif dalam teks berfungsi sebagai pemicu mobilisasi, khususnya dari kelompok mahasiswa, buruh, pelajar, dan komunitas sipil lainnya.

Dari sisi konsumsi, unggahan ini menyasar kelompok masyarakat yang merasa teralienasi dari sistem representasi formal. Frasa seperti “dikembalikan kepada rakyat” menjadi ekspresi kekecewaan terhadap lembaga legislatif yang dianggap tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat. Selain itu, penyebutan “kenakalan kecil” berfungsi sebagai eufemisme yang menunjukkan bentuk perlawanan non-kekerasan dengan makna simbolik tinggi—menegaskan bahwa meskipun aksi dilakukan secara damai, ia tetap memuat pesan ideologis yang kuat terhadap struktur kekuasaan.

Praktik Sosial (Eksplanasi)

Dalam konteks sosial-politik Indonesia pasca-Reformasi, DPR RI secara normatif diposisikan sebagai lembaga representatif rakyat. Namun, dalam praktiknya, muncul kesenjangan antara fungsi representasi tersebut dan persepsi publik mengenai keterlibatan rakyat dalam proses legislasi. Ketegangan ini menjadi latar belakang munculnya narasi resistensi dalam unggahan ini.

Aksi blokade dan penyegehan Gedung DPR dapat dipahami sebagai respons politik terhadap krisis representasi, khususnya terkait proses legislasi yang dianggap tertutup, elitis, dan minim partisipasi publik. Penolakan terhadap RUU TNI secara khusus dilandasi oleh kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam ruang sipil, sesuatu yang secara prinsip bertentangan dengan semangat reformasi 1998.

Narasi “supremasi sipil adalah amanat reformasi” menjadi inti dari pesan ideologis yang diusung, mengacu pada nilai-nilai historis dan legitimasi moral dari perjuangan transisi menuju demokrasi. Pernyataan ini sekaligus memperingatkan bahaya kembalinya pola kekuasaan otoriter dalam bentuk yang baru.

Teks ini juga membentuk identitas kolektif yang inklusif, merangkul elemen-elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pekerja. Kehadiran berbagai aktor sosial dalam satu barisan ideologis menunjukkan bahwa gerakan ini tidak bersifat elitis, melainkan berbasis massa dan berorientasi pada perubahan struktural.

Dengan demikian, ungghahan ini dapat dilihat sebagai ekspresi konflik struktural antara kekuasaan negara dan gerakan sipil yang mengusung demokrasi substantif. Media sosial menjadi arena utama dalam kontestasi wacana politik kontemporer, menggantikan ruang-ruang konvensional seperti jalanan atau ruang publik fisik lainnya sebagai medium utama ekspresi politik masyarakat sipil.

Media Sosial sebagai Media Perlawanan Diskursif dan Ruang Demokratis: Analisis

Media sosial merupakan medium digital yang memungkinkan interaksi dua arah dan partisipasi aktif dari pengguna dalam berbagai aktivitas sosial, termasuk dalam menyampaikan opini dan membentuk wacana publik (Qadri 2020). Dalam konteks kekinian, media sosial juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan ekspresi, termasuk dalam menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara. Sadat, Lawelai, and Suherman (2022) menekankan bahwa internet dan media sosial memiliki peran penting dalam menjamin kebebasan berekspresi, yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini menjadikan media sosial sebagai platform yang representatif, di mana suara-suara yang terpinggirkan bisa muncul dan mendapatkan perhatian publik.

Temuan mengenai penggunaan tagar #TolakRUUTNI menunjukkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena kontestasi politik, khususnya dalam menghadapi dominasi narasi negara. Dalam hal ini, tagar menjadi alat semantik dan simbolik yang memungkinkan terciptanya ruang kontra-wacana (*counter-narratives*). Sejalan dengan Papacharissi dalam Holmstrom et al. (2021), tagar tidak hanya menyampaikan pesan informatif, tetapi juga menyisipkan emosi dan afeksi yang membentuk “jurnalisme afektif” — yaitu produksi informasi yang menggerakkan simpati dan aksi melalui afek digital.

Penelitian-penelitian dalam tradisi teori kritis melihat praktik penggunaan tagar sebagai bagian dari resistensi terhadap hegemoni ideologis negara dan korporasi (Hastuti et al. 2025). Temuan mengenai #TolakRUUTNI menunjukkan bahwa tagar ini tidak sekadar menyebarkan informasi, tetapi mencerminkan bentuk tindakan politik kolektif (Djamaluddin, Hastjarjo, and Satyawan 2023). Dalam konteks ini, solidaritas digital dan keterhubungan emosional antar pengguna menjadi fondasi munculnya digital togetherness, yang memperkuat gerakan sosial daring.

Namun, seperti ditunjukkan Tufekci (2017), gerakan digital yang dimediasi media sosial memang memiliki potensi mobilisasi yang cepat, tetapi juga berisiko mengalami kerapuhan struktural karena tidak memiliki basis organisasi yang solid. Temuan pada kampanye #TolakRUUTNI memperlihatkan karakteristik ini: viralitas tinggi dan daya sebar yang luas, namun kurang memiliki kesinambungan aksi secara fisik dan kelembagaan.

Dalam membaca praktik perlawanan ini, pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) menjadi krusial. KhosraviNik (2022) dan Schuilenburg and Peeters (2020) menunjukkan bagaimana AWK dapat mengurai bagaimana narasi kekuasaan dan resistensi dikonstruksi di ruang digital yang diatur algoritme. Dalam kasus #TolakRUUTNI, tampak bahwa tagar digunakan sebagai alat untuk mendisrupsi narasi dominan dari negara, sembari membangun kontra-wacana dari kelompok sipil — khususnya mahasiswa dan aktivis.

Lebih jauh, dalam konteks negara-negara Global Selatan, seperti Indonesia, tagar memiliki peran strategis dalam mengartikulasikan perlawanan terhadap represi dan ketidakadilan. Seperti diuraikan Lim (2025), tagar seperti #ReformasiDikorupsi dan #TolakRUUTNI

berperan dalam menyatukan kekuatan masyarakat sipil melawan bentuk otoritarianisme baru.

Secara teoritis, temuan ini dapat dibaca melalui pendekatan ruang publik dari Habermas dan teori jaringan perlawanan digital dari Castells, serta konsep kekuasaan dan resistensi dari Foucault. Habermas, sebagaimana dijelaskan Prasetyo (2022), menggambarkan ruang publik sebagai arena pertemuan rasional warga negara untuk berdiskusi mengenai kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya, tidak semua individu memiliki akses setara dalam ruang publik konvensional. Media sosial, khususnya melalui penggunaan tagar seperti #TolakRUUTNI, membuka peluang terciptanya ruang publik alternatif — ruang diskursif di mana wacana kritis terhadap kekuasaan dapat diartikulasikan oleh aktor non-negara.

Castells (2015), dalam *Networks of Outrage and Hope*, menjelaskan bagaimana internet menciptakan ruang otonom komunikasi, yang mampu melahirkan gerakan sosial baru yang menantang struktur kekuasaan mapan. Penggunaan tagar #TolakRUUTNI mencerminkan ruang otonom ini, di mana masyarakat sipil — khususnya anak muda — secara kolektif mengartikulasikan ketidaksetujuan terhadap intervensi militer dalam ranah sipil. Gerakan ini adalah wujud reflektif demokrasi dari masyarakat digital yang menolak penyusupan negara dalam kehidupan sipil.

Sementara itu, konsep kekuasaan Foucault (dalam Ramadhani 2020) menunjukkan bahwa kekuasaan hadir melalui mekanisme halus yang mengatur kehidupan sosial, termasuk melalui wacana dan institusi. Namun, kekuasaan selalu melahirkan resistensi. Penggunaan tagar #TolakRUUTNI dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan diskursif terhadap praktik governmentality negara. Resistensi ini bukan berupa pemberontakan fisik, melainkan artikulasi simbolik yang menantang narasi negara melalui praktik digital sehari-hari.

Dengan demikian, melalui perspektif teoretik dan tinjauan literatur yang telah dikaitkan dengan temuan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tagar #TolakRUUTNI merupakan bentuk nyata dari perlawanan digital yang menggabungkan elemen afektif, simbolik, dan diskursif. Ini memperlihatkan bagaimana media sosial telah berkembang dari sekadar alat komunikasi menjadi ruang politik tempat berlangsungnya demokrasi partisipatif dan resistensi terhadap kekuasaan hegemonik.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai ruang publik alternatif (Habermas), jaringan perlawanan digital (Castells), serta

relasi kuasa–resistensi (Foucault). Penggunaan tagar #TolakRUUTNI menunjukkan bahwa media sosial menjadi arena perlawanan non-fisik yang memfasilitasi resistensi diskursif terhadap narasi hegemonik negara. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya mengakui peran tagar sebagai sarana advokasi dan mobilisasi opini publik. Bagi masyarakat sipil, pemanfaatan tagar dapat menjadi strategi komunikasi politik yang efektif dalam menentang kebijakan negara yang dianggap represif. Sementara bagi negara, temuan ini menjadi peringatan bahwa ruang digital tidak bisa direduksi hanya sebagai media ekspresi, melainkan juga arena politik yang dapat membentuk legitimasi dan delegitimasi kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data utama hanya bersumber dari tiga unggahan akun X (Twitter) @barengwarga, sehingga generalisasi terhadap dinamika wacana #TolakRUUTNI di media sosial masih terbatas. Kedua, pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) meskipun kuat dalam mengungkap dimensi ideologis, cenderung bersifat interpretatif sehingga berpotensi menimbulkan bias peneliti. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan pada dimensi diskursif digital, sehingga tidak mengeksplorasi secara mendalam keterkaitan antara wacana digital dengan aksi offline atau respons kebijakan negara.

Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa penggunaan tagar #TolakRUUTNI oleh akun @barengwarga bukanlah sekadar ekspresi protes digital yang bersifat spontan, melainkan merupakan bagian dari strategi perlawanan diskursif yang terstruktur di ruang media sosial. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, ditemukan bahwa kombinasi bahasa kolokial, gaya satiris, simbol visual, serta pola distribusi digital digunakan secara strategis untuk membentuk wacana penolakan terhadap RUU TNI. Wacana tersebut merepresentasikan keresahan publik terhadap kecenderungan militerisasi sipil dan krisis representasi demokrasi, sekaligus membangun ruang publik alternatif yang lebih horizontal, partisipatif, dan responsif.

Lebih jauh, artikel ini menjelaskan bagaimana tagar #TolakRUUTNI berfungsi sebagai alat mobilisasi digital yang memperkuat identitas kolektif dan memperluas jangkauan resistensi sipil dalam konteks demokrasi digital Indonesia. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa media sosial

bukan hanya kanal komunikasi, tetapi juga arena penting dalam kontestasi wacana dan pembentukan opini publik yang dapat memengaruhi dinamika demokrasi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengayaan literatur tentang komunikasi politik digital dan resistensi sipil melalui pendekatan wacana kritis, khususnya dalam konteks Indonesia yang tengah menghadapi tantangan terhadap nilai-nilai demokrasi. Meskipun penelitian ini terbatas pada tiga unggahan dengan kriteria popularitas tertentu, hasilnya membuka ruang bagi studi lanjutan yang lebih luas dan komparatif lintas platform. Kajian selanjutnya perlu mengeksplorasi keterkaitan antara praktik diskursif digital dan pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan publik maupun penguatan institusi demokrasi secara lebih empiris dan mendalam. Penelitian lanjutan dapat memperluas data dengan menggunakan pendekatan *mixed-method* dan mengaitkan analisis wacana digital dengan praktik politik konkret di lapangan.

Referensi

- Ahaotu, Joseph Onyema and Oluwatomisin Ayoola Oshamo. 2023. "A Multimodal Discourse Analysis of Selected Social Media Posts on the #BlackLivesMatter Protest." *Journal of Pragmatics and Discourse Analysis* 2(1). DOI:10.32996/jpda.2023.2.1.4
- Ali, Zarhat, Hajra Rahman, Usama Subhan, and Umme Habiba. 2025. "Unpacking the Social Context of Online English Language Teaching Platforms: A Critical Discourse Analysis of YouTube Comments." *Journal of Social Signs Review* 3 (4): 63–73. <https://socialsignsreivew.com/index.php/12/article/view/202>
- Angga, Stepanus, Antonius Alfredo Poa Poa, and Fabianus Rikardus Rikardus. 2023. "Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jürgen Habermas." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6 (3): 384–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59229>.
- Castells, Manuel. 2015. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Vol. 11. Polity Press.
- Djamaluddin, Akhmad Ridha, Sri Hastjarjo, and Ignatius Agung Satyawan. 2023. "Analysis of the Symbolic Convergence of Activism with the Hashtag #PercumaLaporPolisi on Twitter Social Media as A Virtual

- Public Space.” *Journal of Social Interactions and Humanities* 2 (1): 15–26. <https://doi.org/10.55927/jsih.v2i1.2866>.
- Febriyanti, Sari and Kosariza Kosariza. 2022. “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2 (1): 123–35. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.16896>.
- Hastuti, Dwi, Loso Judijanto, Efraim Mangaluk, Sepriano, and Parmadi. 2025. *Sosial Politik: Konsep dan Teori*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Holmstrom, Amanda J, Reed M Reynolds, Samantha J Shebib, Travis L Poland, Morgan E Summers, Allison P Mazur, and Salena Moore. 2021. “Examining the Effect of Message Style in Esteem Support Interactions: A Laboratory Investigation.” *Journal of Communication* 71 (2): 220–45. <https://doi.org/10.1093/joc/jqab001>.
- Inobemhe, Kelvin and Tsegyu Santas. 2022. “#EndSARS Protest: A Discourse on Impact of Digital Media on 21st Century Activism in Nigeria.” *Galactica Media Journal of Media Studies* 4(4):100-124. DOI:10.46539/gmd.v4i4.241
- Kabanga, Lewi, Simon Tabuni, and Ayu Nangsi Kalangi. 2023. “Ideologi dalam Pesan Paskah 2023: Pendekatan Analisis Wacana Kritis dengan Model Fairclough.” *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 6 (4): 1095–1110. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i4.792>.
- KhosraviNik, Majid. 2022. “Digital Meaning-Making Across Content and Practice in Social Media Critical Discourse Studies.” *Critical Discourse Studies* 19 (2): 119–23. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1835683>.
- Latiko, Isah Adamu and Adamu Idris. 2024. “Populism and Political Transformation in Nigeria: A Critical Discourse Analysis of General Muhammadu Buhari’s 2015 Chatham House Campaign Speech.” In *Political Communication in Sub-Saharan Africa, Volume II*, edited by Isaac Mhute and Esther Mavengano. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44320-6_12.
- Lim, Merlyna. 2025. *Social Media and Politics in Southeast Asia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108750745>.

- Mahdavi, Sayyid Reza, Morteza Iravani Najafi, and Hasan Naqizadeh. 2025. "The Study of al-Ḥākim al-Nīshābūrī's Virtue Writing on Lady Fāṭimah (AS) Based on Critical Discourse Analysis Theory." *The Journal of Hadith Studies and Researches* 2 (1): 183–224. <https://doi.org/doi.org/10.22034/hsr.2024.51558.1030>.
- Majeed, Tawseef and Ali M. Abushbak. 2024. "Politics of Phygital Protests: Palestinian #GreatMarchofReturn Discourse on Twitter." *Journal of Arab & Muslim Media Research* 17(5). DOI:10.1386/jammr_00072_1
- Panahi, Mahin and Faezeh Vaezzadeh. 2024. "Reflection of Qajar Period Social Discourse in Mastooreh Kurdestani Poems (With the Approach of Norman Fairclough)." *Women's Studies of Sociological and Psychological* 22 (3): 32–37. <https://doi.org/doi.org/10.22051/jwsp.2024.46304.2845>.
- Prasetyo, Arienda Addis. 2022. "Disruption of Libraries as Public Spaces: Dissecting Jurgen Habermas's Thoughts and Digital Public Spaces." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5 (3): 213–218. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i3.46177>.
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. 2022. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1): 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.
- Qadri, Muhammad. 2020. "Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1 (1): 49–63. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i1.4.222>
- Ramadhani, Yunizar. 2020. "Pengetahuan dan Kekuasaan Menurut Michel Foucault dan Analisis Wacana Pendidikan." *Tarbawi* 8 (02). <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v8i02.21>.
- Sadat, Anwar, Herman Lawelai, and Ansar Suherman. 2022. "Sentiment Analysis on Social Media: Hate Speech to the Government on Twitter." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10 (1): 69–76. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.584>.
- Samsuri, Akhmad, Widyatmike Gede Mulawarman, and Yusak Hudiyono. 2022. "Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 di Berita Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough." *Diglosia: Jurnal*

- Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 5 (3): 603–18. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.442>.
- Sebring, Jennifer. 2019. “Hashtag Feminism: Examining Contemporary Feminist Concerns and Social Justice Activism in a Social Media Age.” *Crossings* 3: 49-62.
- Schuilenburg, Marc and Rik Peeters. 2020. *The Algorithmic Society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429261404>.
- Sujadi, Insan. 2025. “Trending Viral Nomor 1 di X Tagar TolakRUUTNI Mencapai 395 Ribu, Apa yang Sedang Terjadi?” *Poskota*, Maret 2025. <https://www.poskota.co.id/2025/03/16/trending-viral-nomor-1-di-x-tagar-tolakruutni-mencapai-385-ribu-apa-yang-sedang-terjadi?>
- Tufekci, Zeynep. 2017. *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. <https://doi.org/10.5325/bustan.11.1.0077>.
- Wuriani, Nur Indah. 2021. “Aktivisme Tagar #PERCUMALAPORPOLISI Sebagai Zeitgeist Demokrasi Siber di Indonesia.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 20 (2): 171–83. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i2.1702>.
- Zuraida. 2023. “Comparing the Effectiveness of Hashtags in Digital Social Movements: A Case Study of #PercumaLaporPolisi and #PolriSesuaiProsedur in Indonesia.” *CHANNEL Jurnal Komunikasi* 11(1). DOI:10.12928/channel.v11i1.339

